

# Pemerintah Tidak akan Ambil Alih Lahan HGU

ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama

Oleh **Novy Lumanauw**

► **JAKARTA** – Pemerintah memastikan tidak akan mengambil alih lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Hal itu dilakukan pemerintah demi menjamin kepastian hukum dan investasi bagi pelaku usaha yang memegang HGU lahan tersebut.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2). "Tidak. Tidak. Tidak. Itu menyangkut kepastian hukum yang harus kita jamin. Pemerintah tidak akan mengambil secara paksa tanah berstatus HGU yang kini diberikan kepada pihak swasta. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan berinvestasi di dalam negeri," jelas Sofyan Djalil.

Meskipun demikian, pemerintah tidak menampik apabila ada pengusaha pemegang HGU yang ingin mengembalikan kepada pemerintah tanah yang dikuasainya maka pemerintah dengan terbuka dan senang hati akan menerima dan kemudian membagikannya menjadi bagian dari program reforma agraria. "Nanti kalau ada yang mau mengembalikan (HGU), pemerintah senang saja. Secara teknis boleh dikembalikan lahan berstatus HGU itu, bahkan hak milik pun kalau misalnya mau dikasih ke negara itu boleh," kata Menteri Sofyan.

Berdasarkan aturan, tanah yang dapat diberikan HGU adalah tanah negara dan HGU hanya dapat diberikan atas lahan yang luasnya minimal 5 hektare (ha). Bila luas tanah yang dimohonkan HGU mencapai 25 ha atau lebih, penggunaan HGU harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai perkembangan zaman. HGU dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan HGU untuk

jangka waktu paling lama 35 tahun. Atas permintaan pemegang HGU dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu itu dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.

Dalam kesempatan itu, Sofyan Djalil juga menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihak-pihak pemegang HGU untuk membebaskan perkampungan atau perdesaan yang berada di dalam kawasan berstatus HGU. Hal itu untuk mencegah terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan pemegang HGU. "Inti prinsipnya adalah, kalau desa lama berada di dalam kawasan hutan HGU, maka harus dilepaskan. Sebab letak desa itu seharusnya di situ. *Kan*, HGU atau konsesi datang belakangan," kata Sofyan Djalil.

Menurut Sofyan, Kepala Negara juga telah menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk mempercepat proses pendataan dan penataan tanah yang berada di kawasan hutan agar masyarakat mendapatkan manfaat atas kepemilikan tanah. "Nantinya, tanah di kawasan hutan akan diberikan kepada masyarakat. Ini supaya masyarakat hukum adat dan masyarakat ulayat juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/2). Rapat yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla khusus membahas tentang kebijakan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan.

Presiden Jokowi mengatakan, setelah dilakukan pendataan dan penataan tanah di kawasan hutan, BPN wajib melakukan inventarisasi dan verifikasi

penguasaan tanah. "Jangan sampai prosesnya berbelit-belit, disederhanakan, dipercepat sehingga keluhan-keluhan rakyat yang sampai ke kita itu bisa kita selesaikan secara cepat," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi secara khusus mengingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan sangat penting, terutama untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah di kawasan itu. "Saat saya melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu sempat bertemu dengan seorang warga yang kampungnya berlokasi di lahan yang diberikan hak konsesi kepada swasta. Akhirnya terjadi sengketa dan rakyat kalah dalam sengketa," katanya.

Selain itu, lanjutnya, kasus serupa juga dialami masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Perhutani di Pulau Jawa. Menurut Presiden Jokowi, banyak kampung-kampung di kawasan perhutani yang tidak bisa membangun jalan asphalt. Setiap akan melakukan pengaspalan jalan harus mengajukan izin terlebih dulu kepada pihak pemegang konsesi. "Hal-hal seperti ini yang saya kira harus cepat diselesaikan," kata Presiden Jokowi.

## Tenggat Dua Bulan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, Presiden Jokowi memberikan waktu dua bulan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah konflik permukiman di kawasan hutan, termasuk di dalamnya kawasan hutan yang sudah menjadi HGU. "Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah pemukiman di dalam konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi lainnya yang ada disebut dalam HGU. Jadi kita dikasih waktu dua bulan oleh Bapak Presiden beresin itu," jelas Siti mengutip arahan Presiden Jokowi.

Siti Nurbaya mengakui banyak persoalan di kawasan hutan. Sesuai Perpres No 83 Tahun 2017, sudah 26 provinsi yang melakukan inventarisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). "Sebanyak 20 provinsi sudah menerbitkan



## Revitalisasi Perkebunan Karet

Petani menyemprotkan cairan pestisida di lahan perkebunan karet Renah Pamenang, Merangin, Jambi, Selasa (26/2/2019). Kementerian Pertanian menyiapkan alokasi dana sebesar Rp96 miliar pada tahun ini untuk perluasan perkebunan karet hingga 6.010 hektare dan peremajaan (replanting) karet di delapan provinsi Aceh, Sumbang, Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

surat keputusan (SK) pencadangan, sudah ada kawasan-kawasan yang dilepaskan dari hutan, sudah diverifikasi misalnya kalau dari kawasan hutan ya, yang pemukiman, rakyat ada di dalamnya," jelas Siti.

Contohnya, permukiman transmigrasi dan lain-lain itu ada 264 ribu hektare (ha), permukiman yang ada di dalam hutan yakni ada permukiman, fasum, dan fasos sekitar 307 ribu ha, lahan garapan dan sawah 64 ribu ha, dan lahan kering diproyeksikan 183 ribu ha. "Ini sudah diinventarisasi, dibahas dengan kepala daerahnya, hanya memang yang harus disiapkan adalah sebetulnya pemerintah

daerahnya harus lebih aktif mendorong apa usulan-usulan masyarakat," ujar Siti. Presiden telah meminta Menko Perekonomian untuk mengundang para gubernur supaya menyelesaikan masalah-masalah ketidakpastian masyarakat di dalam hutan terutama di permukimannya.

Menteri LHK Siti Nurbaya juga menjelaskan, rata-rata permasalahan sengketa yang menyangkut kawasan konsesi hutan sudah selesai. Contohnya, masalah pembangunan pelabuhan di Bengkulu, artinya konflik sudah tidak lagi menyangkut masalah hutan. Namun demikian, Presiden

meminta masalah permukiman yang menyangkut rakyat diprioritaskan. "Perintah Presiden utamakan kepentingan rakyat, tapi jangan lupa ada juga kepentingan lingkungan dan bisnisnya. Itu harus diimbangkan. Karena itu, kebijakan penetapan HTI (Hutan Tanaman Industri) atau perencanaan di dalam HTI tergantung pada beberapa hal, antara lain kebijakan baru itu tentu dalam pertimbangan keseimbangan itu tadi. Kita juga tidak mau untuk rakyat tapi bisnisnya hancur sama sekali makanya harus ada keseimbangan-keseimbangan," kata Menteri Siti. (t)

## Pemerintah Optimalkan Penggunaan Karet Domestik

**JAKARTA** – Pemerintah terus mengoptimalkan penggunaan atau penyerapan karet di pasar dalam negeri, sehingga tidak terjadi kelebihan suplai (*oversupply*) dan harga komoditas tersebut tetap terjaga. Salah satu cara

yang ditempuh pemerintah adalah dengan memperbanyak penggunaan karet untuk bahan dasar produk ban dan asphalt.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, hilirisasi karet di Tanah Air sebe-

narnya sudah berjalan dan banyak jumlahnya, yakni dengan adanya pabrik ban dan serbuk karet (*crumb rubber*). Saat ini ada satu lagi penggunaan karet alam di Tanah Air yakni untuk asphalt. "Yang untuk asphalt ini yang kita dorong agar penggunaan karetinya lebih masif lagi. Untuk industri ban, bahkan sudah ekspor. Namun ke depan standar dari produk yang diekspor akan ditingkatkan. Industrinya sangat mencukupi karena karet bisa digunakan langsung dan bisa dipakai untuk *recycle* ban," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa (26/2).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ke depan pihaknya juga mendorong penggunaan karet dalam bidang perhubungan atau transportasi. "Pembangunan pabrik pengolahan karet juga akan terus dilakukan. "Produk yang berhubungan dengan karet diinisiasi untuk buat pabrik di Indonesia. Contoh besarnya adalah membuat pabrik vulkanisir di Indonesia," jelas Budi Karya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah impor, kondisi industri dalam negeri dilihat juga cukup memadai. Yang selama ini diimpor justru bisa dilakukan di dalam negeri. "Jadi punya karya sendiri diproduksi di pabrik-pabrik di sini dan diberikan ke masyarakat," ujar Budi Karya.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya terus mendorong produsen dari dunia industri untuk menyediakan keperluan perhubungan dengan bahan dasar karet. Barang-barang yang sudah diproyeksikan Kemenhub bisa menggunakan karet sebagai bahan dasarnya adalah *roller barrier* alias pagar di tikungan dan *speed hunt* yang bisa melambatkan laju kendaraan seperti polisi tidur. "Nanti ada *roller barrier*, pas di tikungan ada besi, sekarang pakai ini. Kalau pakai bahan karet bisa mantul, alat ini sudah dipasang di Sukabumi. Juga *speed hunt* (pemantau kecepatan) seperti polisi tidur. *Water barrier* akan diganti juga menggunakan karet," tutur Budi.

Pemerintah berkomitmen mengatasi harga karet alam yang berada di level rendah sepanjang 2018 hingga awal 2019 akibat adanya sentimen negatif dari pasar serta ketidakpastian ekonomi global. Hal ini dilakukan dengan tiga kebijakan dari sisi jangka pendek, menengah, dan panjang, yakni dengan mengatur jumlah ekspor karet alam, meningkatkan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan (*replanting*) karet alam.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo mengatakan, upaya pengurangan ekspor terjadi karena ketidakakuratan persepsi di pasar terhadap kondisi fundamental karet. Dengan begitu, harga yang ada saat ini terlalu rendah sehingga kurang menarik bagi petani. "Kami cubit pasar supaya pasar terbangun dari lalapnya asumsi bahwa di global ada banyak barang," ujar Moenardji.

Gapkindo berharap harga karet bisa kembali ke angka US\$ 2 per kilogram (kg). Jika harga terangkat, petani akan bersedia menanam karet dan pelaku industri yang ada bisa menyerap lebih banyak. Utilisasi kapasitas industri karet masih rendah yaitu berkisar 60%, seharusnya utilisasi kapasitas bisa mencapai 80%. Hal ini menunjukkan kondisi industri sedang tidak efisien. Saat ini, stok yang ada tidak perlu ditambah dulu agar pasar bisa menyerap karet yang ada. "Pemerintah telah memahami hal ini dan melakukan diplomasi tertinggi. Kami berterimakasih ini menjamin kelancaran usaha kami," ucap Moenardji. (ark)

## 10 Kapal Terbakar di Muara Baru Diduga Ilegal

**JAKARTA** – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa dari 34 kapal yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, pada Sabtu (23/2), ditemukan ada 10 kapal baru yang diduga ilegal. Dugaan itu muncul salah satunya karena kapal-kapal tersebut tidak memiliki rekomendasi pembangunan kapal dari KKP.

KKP menyampaikan *update* hasil pengecekan dokumen terhadap kapal-kapal yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru. Hasilnya, dari 34 kapal yang terbakar, ditemukan dua kapal eks asing, 10 kapal baru yang diduga ilegal (tidak terdada di KKP, tidak ada rekomendasi pembangunan kapal dari KKP, dan di Kement-

rian Perhubungan), 10 kapal dengan izin yang masih aktif, empat kapal yang sementara proses perizinan (bayar pajak, dll), enam kapal yang sudah ditolak permohonan izinnya (karena dokumen salah, tidak lengkap, dan harus cek fisik), dan dua kapal yang sudah *expired* izinnya tapi belum mengajukan permohonan perpanjangan. "Ada 10 kapal yang kami duga ilegal karena bukan tidak punya izin, tapi terdaftar pun tidak," tulis keterangan KKP, Selasa (26/2) malam.

Semula, 27 bangkai kapal ada di kolam labuh dan tujuh berada di luar kolam labuh. Sebagian bangkai kapal saat ini sudah ditarik keluar dari kolam. Penelusuran lebih lanjut atas kejadian kebakaran

kapal tersebut akan dilakukan. Berdasarkan data yang dirilis KKP, ke-10 kapal yang diduga ilegal adalah Kapal Pesisir Andalan-3 (tidak ada rekomendasi P2KP), Kapal Sinar Surya A1 (tidak ada rekomendasi P2KP), Kapal Indo Prima-6 (tidak ada rekomendasi P2KP), Kapal Indo Prima-5 (tidak ada rekomendasi P2KP), Kapal Permai Timur-8 (tidak ada rekomendasi P2KP), Kapal Permai Timur-16 (tidak ada rekomendasi P2KP), Kapal Permai Timur-17 (tidak ada rekomendasi P2KP), Kapal Permai Timur-18 (tidak ada rekomendasi P2KP), Kapal Permai Timur-19 (tidak ada rekomendasi P2KP), dan Kapal Permai Timur-20 (tidak ada rekomendasi P2KP). (t)

## Ekspor Produk Pertanian Lewat Soetta Rp 1,26 Triliun

**TANGERANG** – Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Barantan Kementan) melalui Karantina Pertanian Bandara Soekarno Hatta (Soetta) merilis data layanan sertifikasi kesehatan produk pertanian yang telah diekspor ke mancanegara sebanyak 2.254 kali senilai Rp 1,26 triliun sepanjang Januari-Februari 2019. Ragam produk yang diekspor semakin banyak, seperti komoditas jengkol, daun jeruk purut, dan petai, tren jumlah dan tujuan negara juga menunjukkan peningkatan.

Kepala Barantan Kementan Ali Jama menjelaskan, selama Januari-Februari 2019 produk pertanian yang diekspor melalui Bandara Soetta baik media pembawa karantina hewan dan karantina tumbuhan telah mendapatkan percepatan layanan. Sebagai salah satu tempat pengeluaran yang terbanyak baik dari sisi jumlah dan jenis

maka penerapan percepatan layanan karantina baik berupa *inline inspection* maupun layanan prioritas harus diterapkan. "Penguatan sistem perkarantinaan menjadi hal yang mutlak diterapkan guna mendorong percepatan ekspor," kata Ali Jama saat melepas ekspor 10 produk pertanian di Kargo Garuda, Cengkareng, Banten, Rabu (26/2).

Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Bandara Soetta Imam Djajadi memberikan data 10 produk pertanian yang dilepas ekspor pada Rabu (26/2) masing-masing adalah sarang burung walet sebanyak 623,50 kilogram (kg) senilai Rp 26,87 miliar, buah manggis 11,92 ton senilai Rp 487 juta, dan rambutan 5,60 ton senilai Rp 204 juta. Komoditas ekspor lainnya adalah telur tetas 4 ton senilai Rp 0,12 miliar, vaksin 137 kemas Rp 1,60 miliar, reptil sebanyak 31.173 ekor

senilai Rp 1,09 miliar. Tiga komoditas pertanian yang mulai bertumbuh, *emerging commodities*, yakni petai 930 kg senilai Rp 52 juta, jengkol 610 kg senilai Rp 34 juta, dan ubi cilembu 1.920 kg senilai Rp 80 juta. "Keseluruhan produk ekspor pertanian ini telah melewati proses karantina sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, sehat, dan aman dilululintaskan," ujar Imam.

Turut hadir pada pelepasan ekspor produk pertanian di Bandara Soetta tersebut adalah seluruh jajaran instansi terkait yang tergabung dalam Komunitas Bandara Soekarno Hatta (Kombata), dinas pertanian dan peternakan Provinsi Banten, dan para eksportir. "Saya instruksikan kepada seluruh jajaran karantina pertanian untuk mengawal ekspor, pastikan produk pertanian kita sehat, aman, dan diterima di negara tujuan ekspor," pungkaskan Imam. (t)

## Kebakaran Lahan di Riau Capai 1.136 Ha

**PEKANBARU** – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang terjadi sejak Januari hingga Februari 2019 ini terus meluas hingga mencapai 1.136 hektare (ha). Angka itu melonjak lebih dari 150 ha dalam kurun waktu kurang dari 48 jam terakhir. "Titik-titik api masih cukup banyak terdeteksi di pesisir Riau seperti Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir," Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Riau Edwar Sanger seperti dilansir *Antara* di Pekanbaru, Riau, Selasa (26/2).

Dia merincikan, Kabupaten Bengkalis sejauh ini masih merupakan wilayah yang paling parah mengalami karhutla. Sedikitnya lahan di lima kecamatan di Kabupaten kaya sumber daya alam Migas itu hangus terbakar. Salah satu daerah yang saat ini menjadi fokus pemerintah daerah dan pusat adalah Pulau Rupat, Bengkalis. Wilayah itu selama dua pekan terakhir terus di-

landa karhutla hingga lebih dari 200 hektare. Ratusan personel gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD serta masyarakat terus berjibaku melakukan pemadaman.

Namun, upaya itu belum membuahkan hasil maksimal. Tak hanya darat, tim udara juga terus berjibaku melalui operasi pengeboman air. Bahkan, hari ini satu sekolah di Rupat terpaksa diliburkan karena kondisi udara pada level membahayakan dengan jarak pandang hanya 100 meter. (t)



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	: Kamis, 21 Maret 2019
Tempat	: Mainhall Gedung Bursa Efek Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta - 12190
Waktu	: 14.00 WIB - Selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir 31 Desember 2018**  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Pasal 69 dan Pasal 78, Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS Tahunan Perseroan, serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahun berjalan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi, dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019, serta Tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Tahun 2018.**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 *juncto* Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**  
Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- Perubahan Pengurus Perseroan.**  
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a *juncto* pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

**Catatan:**

- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Februari 2019, yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
- Bahan-bahan Rapat, telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, [www.wikagedung.co.id](http://www.wikagedung.co.id) mulai tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal Rapat.
- Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") yang telah ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindio Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, dan semua Surat Kuasa dimaksud harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor BAE tersebut.
- a. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, dimohon agar membawa fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran.  
b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.  
c. Bagi pemegang saham yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
- Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham dimohon agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Februari 2019  
**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**  
Direksi